

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI MALUKU UTARA 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
 - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
 - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
 - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
 - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
 - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

Perkembangan Pembangunan Provinsi Maluku Utara 2014

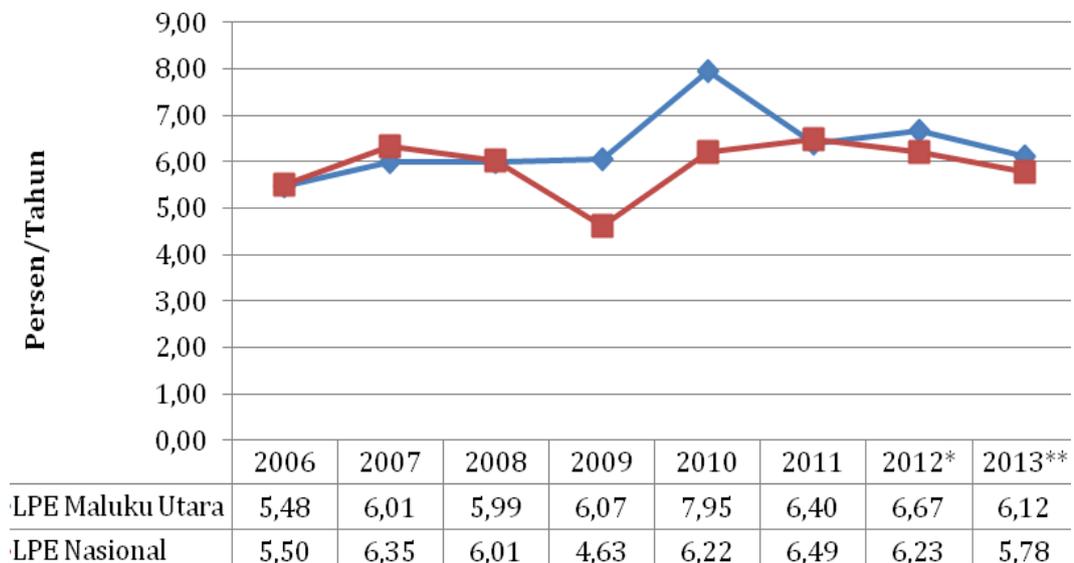
SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Maluku Utara memiliki beragam potensi ekonomi, dari sumber daya alam berbasis pertanian, kelautan dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran utama yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Implementasi pertumbuhan ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja serta dalam jangka panjang diharapkan dapat memperkecil tingkat kemiskinan. Kinerja perekonomian Provinsi Maluku Utara selama periode 2006-2013 cukup baik, yang terlihat dari rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,34 persen (Gambar 1). Laju ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) pada periode yang sama sebesar 5,90 persen. Kontribusi Maluku Utara terhadap pembentukan PDRB Wilayah Kepulauan Maluku sebesar 37,62 persen, dan menyumbang sebesar 0,10 persen terhadap PDB nasional pada tahun 2012.

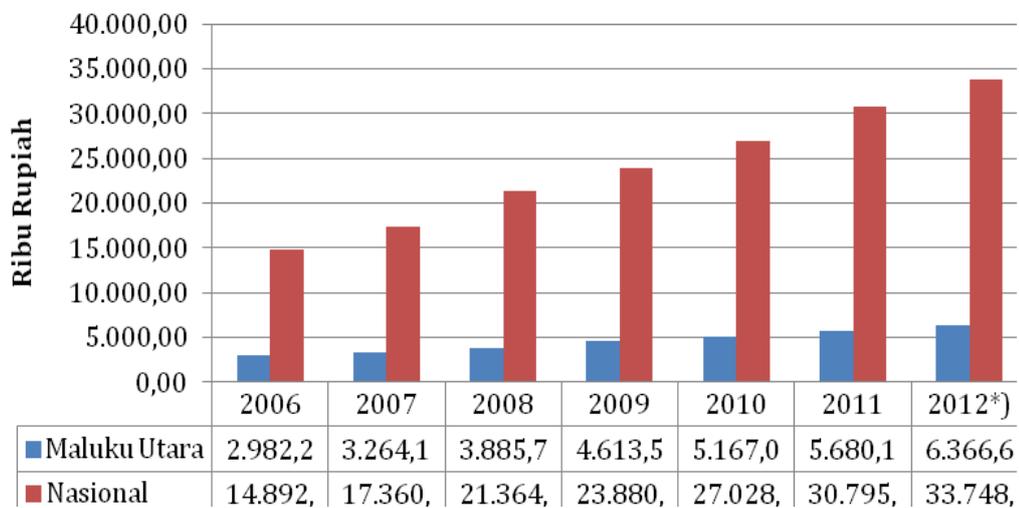
Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000



Sumber: BPS, 2013

Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB per kapita di Provinsi Maluku Utara selama kurun waktu 2006-2012 cenderung meningkat, yang menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan di provinsi ini walaupun masih jauh dari rata-rata nasional pada periode tersebut. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB perkapita Provinsi Maluku Utara dan PDB nasional sebesar 20,03 persen, maka pada tahun 2012 rasionya menurun menjadi 18,86 persen (Gambar 2). Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Gambar 2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

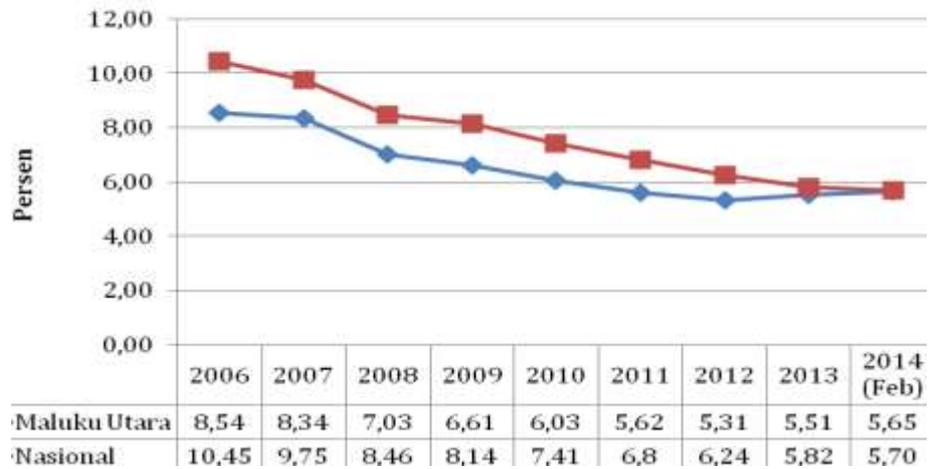


Sumber: BPS, 2013

2. Pengurangan Pengangguran

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran di Provinsi Maluku Utara cenderung menurun. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Maluku Utara selama 2006-2013 berkurang sebesar 3,03 persen (Gambar 3). Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku Utara tergolong rendah, namun mengindikasikan rendahnya produktivitas pekerja di daerah karena tingkat pendapatan perkapita juga rendah.

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka

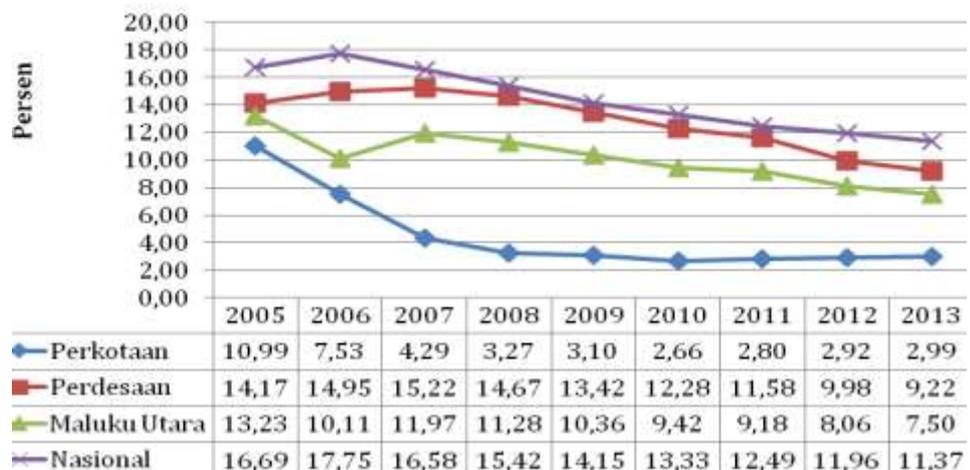


Sumber: BPS, 2014

3. Pengurangan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara. Selama kurun waktu 2006-2013 persentase penduduk miskin di provinsi ini cenderung menurun, baik di perkotaan maupun di perdesaan (Gambar 4). Secara nasional persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara tergolong rendah. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di nasional sudah mencapai 11,37 persen, sedangkan di Provinsi Maluku Utara sebesar 7,50 persen. Rendahnya produktivitas, keterbatasan modal, serta rendahnya akses informasi dan akses pasar dalam memanfaatkan sumber daya alam menyebabkan masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Sumber daya alam harus optimal pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di Provinsi Maluku Utara.

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2013

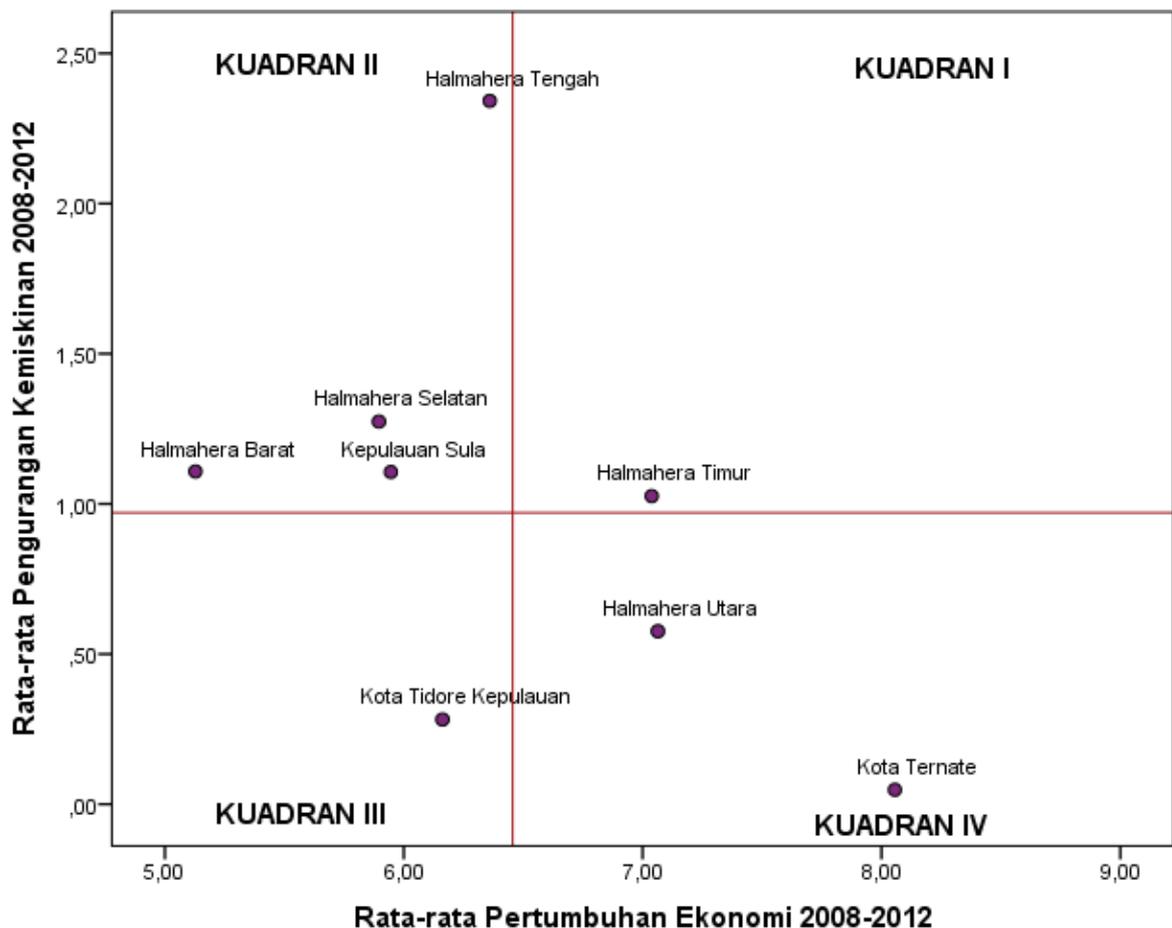
B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, Kabupaten Halmahera Timur termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kedua, Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, dan Kepulauan Sula terletak di kuadran II, termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Ketiga Kota Tidore Kepulauan terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Keempat, Kabupaten Halmahera Utara dan Kota Ternate terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

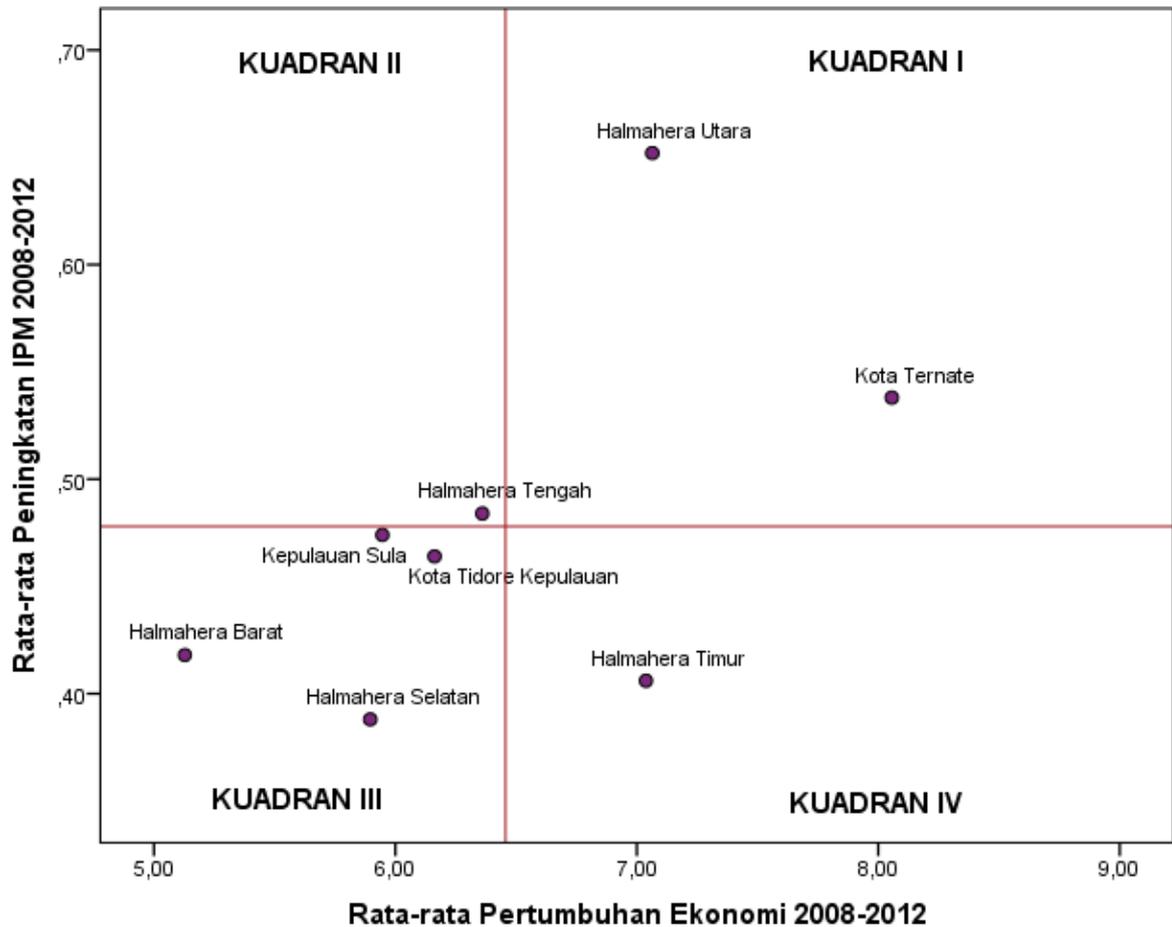
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Halmahera Utara dan Kota Ternate merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Halmahera Tengah terletak di kuadran II, termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan

kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Ketiga, Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

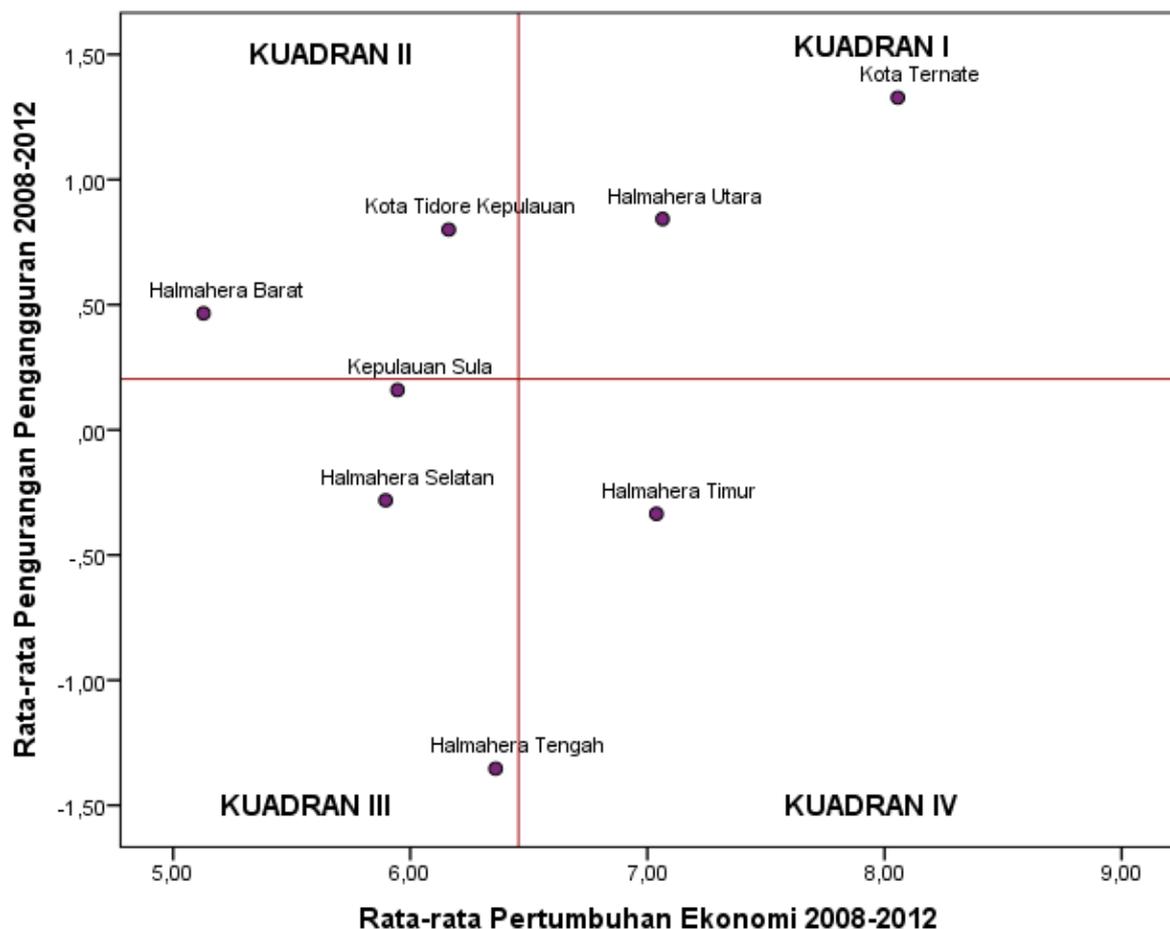
Keempat, Kabupaten Halmahera Timur terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Halmahera Utara dan Kota Ternate merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Kedua, Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Provinsi Maluku Utara Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

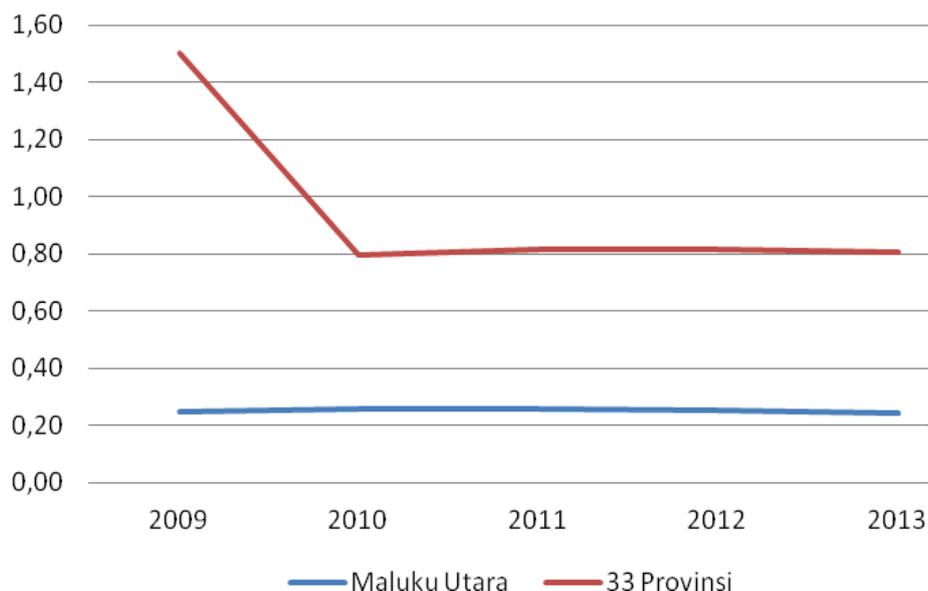
Ketiga, Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, dan Halmahera Tengah terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Keempat, Kabupaten Halmahera Timur terletak di kuadran IV, dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan serta mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 memiliki kecenderungan semakin meningkat walaupun masih berada di bawah rata-rata nasional. Kesenjangan ekonomi yang terjadi di Maluku Utara berkategori rendah. Penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial di Maluku Utara adalah rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama untuk masyarakat di perdesaan. Ketimpangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan juga ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

Gambar 8
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2007-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Indikasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar wilayah. Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Maluku Utara terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 1). Rata-rata pendapatan perkapita kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara rendah dan berada di bawah rata-rata nasional. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara relatif lebih rendah dari rata-rata 34 provinsi di Indonesia. Perkembangan nilai PDRB perkapita antarkota dan kabupaten di Maluku Utara seimbang, menunjukkan kemakmuran di wilayah ini lebih rendah dari rata-rata nasional.

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Maluku Utara Tahun 2007-2012 (000/jiwa)

Kab/ Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Halmahera Barat	2.480	2.743	3.062	3.407	3.762	4.191
Halmahera Tengah	6.197	7.105	8.974	10.218	11.395	12.476
Kepulauan Sula	2.916	3.389	3.906	444	4.894	5.472
Halmahera Selatan	3.139	3.699	4.106	4.500	4.933	5.502
Halmahera Utara	3.058	3.438	4.139	4.884	5.440	5.748
Halmahera Timur	4.395	5.190	5.907	6.539	7.232	7.872
Pulau Morotai	-	-	-	3.879	4.278	4.828
Kota Ternate	3.296	3.935	4.609	5.312	6.024	6.925
Kota Tidore Kepulauan	3.329	3.888	4.384	4.914	5.330	5.943
Maluku Utara	3.264	3.895	4.614	5.167	5.680	6.367

Sumber: BPS, 2013

C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Tingginya Ketergantungan pada Sektor Primer (Pertanian)

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah, terutama potensi ekonomi untuk diberdayakan sesuai dengan kemampuan daerah dan prospek di masa mendatang. Provinsi Maluku Utara telah mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Struktur perekonomian Maluku Utara masih didominasi sektor pertanian, diikuti perdagangan dan industri pengolahan. Peranan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih sangat rendah, seperti sektor utilitas (listrik, gas, air) dan konstruksi hanya menyumbang di bawah 5 persen dalam PDRB tahun 2013 (Tabel 2).

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	33,77	31,80
2.	Pertambangan	4,39	3,69
3.	Industri Pengolahan	12,46	11,31
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,56	0,47
5.	Konstruksi	3,29	1,95
6.	Perdagangan, Hotel, Restauran	26,92	31,02
7.	Angkutan, Telekomunikasi	7,65	8,02
8.	Keuangan	3,84	3,71
9.	Jasa-jasa	7,11	8,01
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

Kuatnya peran sektor pertanian dalam perekonomian daerah dapat terlihat pada analisis sektor basis. Apabila ditelusuri lebih lanjut, sektor basis daerah antara lain pertanian dan perdagangan (Tabel 3). Di antara sektor-sektor *tradable* (dapat diperdagangkan antardaerah), komoditas tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, semuanya memiliki nilai *Location Quotient* lebih besar dari satu ($LQ > 1$). Subsektor angkutan laut, angkutan sungai danau dan penyeberangan, serta angkutan udara juga memiliki nilai *LQ* positif. Hal ini menunjukkan Maluku Utara memiliki *proportional share* lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sub sektor tersebut, sebaliknya kelompok sektor industri pengolahan memiliki nilai *LQ* kurang dari satu ($LQ < 1$).

Tabel 3
Nilai LQ Sektor Ekonomi Provinsi Maluku Utara Tahun 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	2,63	2,61	2,62	2,65	2,64
a. Tanaman Bahan Makanan	1,45	1,40	1,40	1,40	1,41
b. Tanaman Perkebunan	8,38	8,64	8,78	8,91	8,79
c. Peternakan	0,78	0,74	0,74	0,74	0,73
d. Kehutanan	2,52	2,58	2,52	2,50	2,57
e. Perikanan	2,09	2,06	2,03	1,96	1,87
2. Pertambangan dan Penggalian	0,58	0,50	0,51	0,52	0,52
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pertambangan Bukan Migas	1,56	1,25	1,24	1,22	1,16
c. Penggalian	0,52	0,51	0,51	0,51	0,53
3. Industri Pengolahan	0,48	0,48	0,47	0,46	0,45
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,52	0,52	0,52	0,50	0,48
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,68	0,59	0,59	0,61	0,61
a. Listrik	0,57	0,52	0,55	0,51	0,53
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	2,27	2,16	2,34	2,27	2,51
5. Konstruksi	0,28	0,28	0,27	0,29	0,31
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	1,44	1,54	1,57	1,59	1,63
a. Perdagangan Besar dan Eceran	1,71	1,85	1,87	1,87	1,92
b. Hotel	0,33	0,31	0,33	0,30	0,27
c. Restoran	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,99	0,92	0,86	0,83	0,80
a. Pengangkutan	1,48	1,47	1,46	1,42	1,42
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	0,97	0,97	0,97	0,96	0,93
3). Angkutan Laut	5,08	5,25	5,50	5,50	5,65
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	1,19	1,12	1,29	1,24	1,16
5). Angkutan Udara	1,63	1,60	1,45	1,39	1,42
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
b. Komunikasi	0,59	0,54	0,48	0,46	0,44
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	0,36	0,38	0,38	0,38	0,38
a. Bank	0,14	0,15	0,16	0,17	0,17
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,67	0,68	0,71	0,70	0,68
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estat	0,81	0,81	0,80	0,82	0,81
e. Jasa Perusahaan	0,02	0,04	0,04	0,03	0,03
9. Jasa-jasa	0,83	0,82	0,84	0,85	0,85
a. Pemerintahan Umum	1,38	1,39	1,45	1,50	1,55
b. Swasta	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,91	0,89	0,87	0,88	0,90
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,56	0,60	0,55	0,58	0,54
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,18	0,19	0,17	0,17	0,16

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Beberapa indikator di atas menekankan pentingnya pengembangan sektor pertanian yang menjadi tumpuan sebagian tenaga kerja di wilayah Provinsi Maluku Utara, serta pengembangan sektor industri pengolahan non migas. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. *Pertama*, sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap

komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. *Kedua*, sektor industri pengolahan non migas sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), dan menciptakan lapangan kerja.

Tabel 4
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	228.699	222.648	-6.051
2	Pertambangan	9.720	12.435	2.715
3	Industri Pengolahan	10.354	16.068	5.714
4	Listrik, Gas, Air	3.888	2.361	-1.527
5	Bangunan	14.102	24.925	10.823
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	49.089	55.153	6.064
7	Angkutan & Telekomunikasi	21.196	29.395	8.199
8	Keuangan	789	5.136	4.347
9	Jasa-Jasa	58.878	97.365	38.487
	Total	396.715	465.486	68.771

Sumber: BPS, 2014

Selama periode 2010-2014, meski pangsa masih kecil sektor industri pengolahan mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan. Perubahan jumlah orang yang bekerja di sektor jasa-jasa, bangunan, angkutan dan telekomunikasi, perdagangan, dan industri pengolahan menunjukkan peningkatan (Tabel 4). Ke depan, sektor industri pengolahan masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor jasa-jasa dan bangunan yang kurang produktif. Selain sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi juga memiliki potensi yang besar untuk di tingkatkan. Peran sektor ini cukup strategis dalam meningkatkan mobilitas dan distribusi barang dan jasa di provinsi Maluku Utara.

2. Kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi tahun 2013 adalah pada konsumsi rumah tangga, dengan kontribusi lebih besar dari 60 persen (Tabel 5). Sektor investasi (PMTB) sebagai sektor yang penting bagi pertumbuhan daerah memberikan kontribusi sebesar 10 persen. Investasi berperan meningkatkan stok kapital di daerah yang digunakan untuk berproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi. Provinsi Maluku Utara menjadi daerah yang memiliki investasi kecil. Kurangnya investasi di Maluku Utara lebih disebabkan karena terbatasnya infrastruktur seperti jalan, jembatan, utilitas, serta sarana pelabuhan yang mendukung iklim investasi.

Tabel 5
PDRB Menurut Penggunaan 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	67,98	83,25
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	0,74	0,87
3.	Konsumsi Pemerintah	31,43	30,33
4.	PMTB	10,20	8,23
5.	Perubahan Stok	9,11	-21,34
6.	Ekspor	24,54	25,18
7.	Impor	25,78	26,53
	Total	100,00	100,00

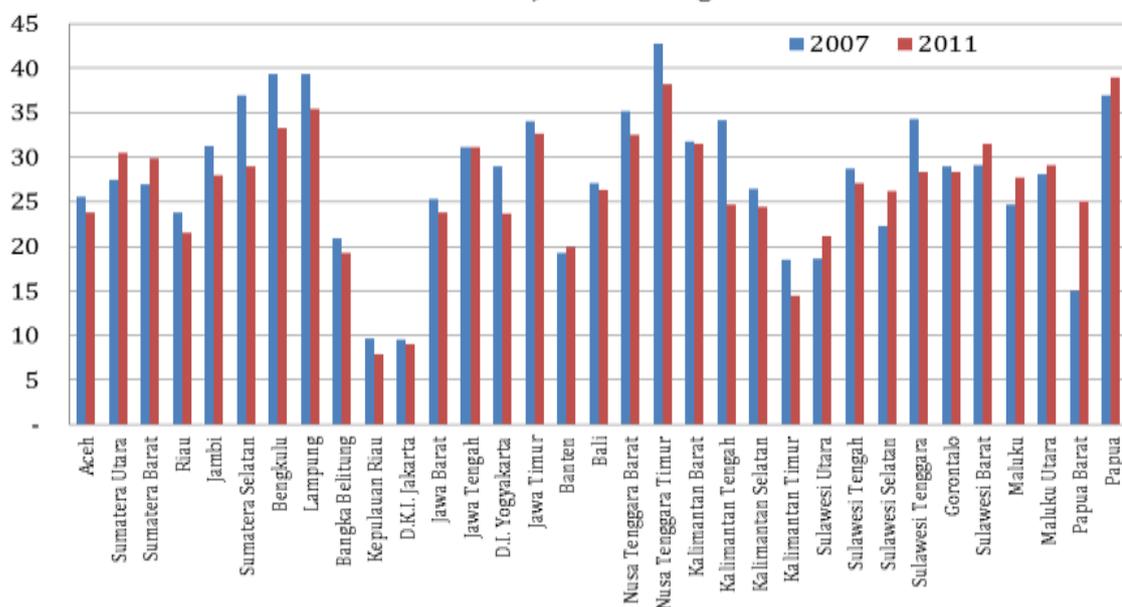
Sumber : BPS, 2013

Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Salah satu indikatornya adalah kemudahan pelayanan perijinan. Dalam hal ini meski semua kabupaten di Provinsi Maluku Utara telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun masih perlu dipastikan bahwa implemmentasi PTSP tersebut dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, baik dalam hal biaya maupun waktu yang dibutuhkan.

3. Rendahnya Kualitas Lapangan Kerja

Kualitas lapangan kerja ditunjukkan dari banyaknya pekerja yang bekerja di sektor informal. Mereka ini terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap sedikit saja guncangan ekonomi yang terjadi. Porsi pekerjaan kurang berkualitas di Maluku Utara meningkat dari tahun 2007 dan mencapai 29 persen pada tahun 2011 (Gambar 9).

Gambar 9
Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas



Sumber: BPS, 2012

Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas lapangan kerja adalah dengan memperluas kesempatan kerja formal, memperlancar perpindahan pekerja dari pekerjaan yang produktivitasnya rendah ke pekerjaan yang produktivitasnya tinggi, dan mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja yang masih berada di sektor informal dan mempersempit kesenjangan upah pada tingkat produktivitas yang sama. Kebijakan pembangunan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan kebijakan pembangunan sektor industri yang berbasis agrobisnis dan agroindustri

4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Sistem transportasi antarpulau di Wilayah Kepulauan Maluku yang mendukung Posisi Maluku Utara dengan kondisi relatif terisolir dan merupakan wilayah kepulauan adalah transportasi laut dan penyebrangan yang saat ini masih terbatas. Sementara untuk interkoneksi transportasi darat dan secara keseluruhan wilayah Maluku Utara dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 5.348 km. Jika dilihat dari sisi kuantitas sebenarnya ketersediaan jaringan jalan di Maluku Utara untuk mendukung transportasi darat belum cukup memadai. Hal ini terlihat dari indikator kerapatan jalan, yang menunjukkan rasio panjang jalan dalam kilometer terhadap luas wilayah dalam kilometer persegi, dan dinyatakan dalam persen (Tabel 6).

Tabel 6
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73

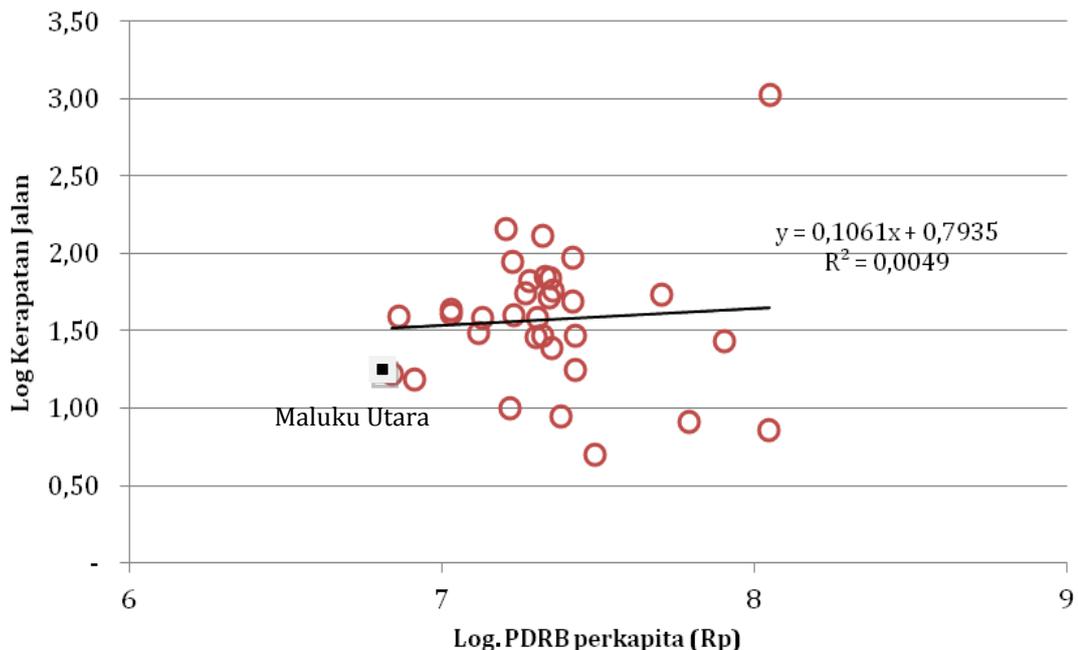
No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	Indonesia	33.531	25,99

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Berdasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kerapatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian, dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan positif antara PDRB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 10). Semakin tinggi pendapatan per kapita wilayah kerapatan jalannya cenderung tinggi pula. Provinsi-provinsi yang posisinya di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan ukuran ini terlihat bahwa posisi Maluku Utara relatif lebih rendah dibandingkan perekonomian dengan tingkat pendapatan perkapita yang sama. Dengan demikian panjang jalan menjadi permasalahan utama bagi Maluku Utara. Sementara ketersediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyebrangan untuk mendukung transportasi antar pulau masih belum memadai dan kualitasnya yang kurang baik.

Gambar 10

Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Secara kualitas, kondisi jalan di Maluku Utara relatif baik, ditunjukkan dari panjang jalan yang sudah beraspal di provinsi ini. Permukaan jalan beraspal di Maluku Utara sudah mencapai di atas 50 persen pada tahun 2012 (Tabel 7), menunjukkan daya dukung jalan untuk pergerakan barang relatif baik. Kondisi jalan yang buruk akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan membengkakkan biaya distribusi barang antar daerah, yang pada gilirannya menghambat perekonomian daerah. Dengan adanya perbedaan kapasitas fiskal antardaerah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan integrasi jaringan jalan antarwilayah.

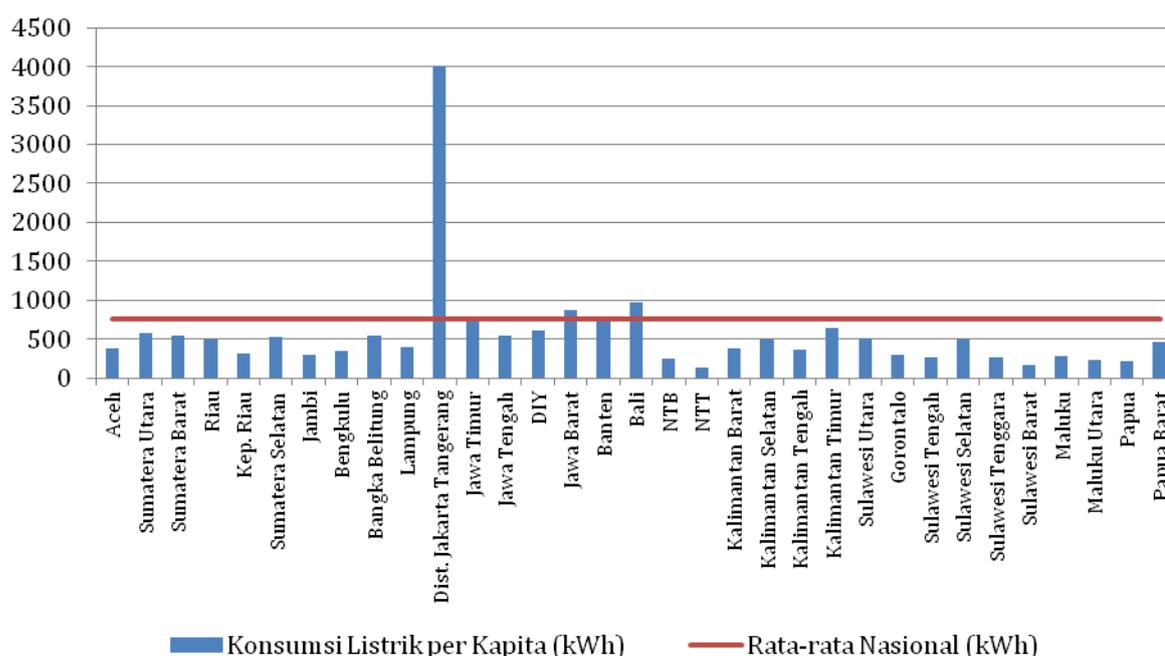
Tabel 7
Panjang Jalan Nasional Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Maluku Utara	1.517	81	200	11	140	7	10	1	1.867	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

Sumber: BPS, 2012

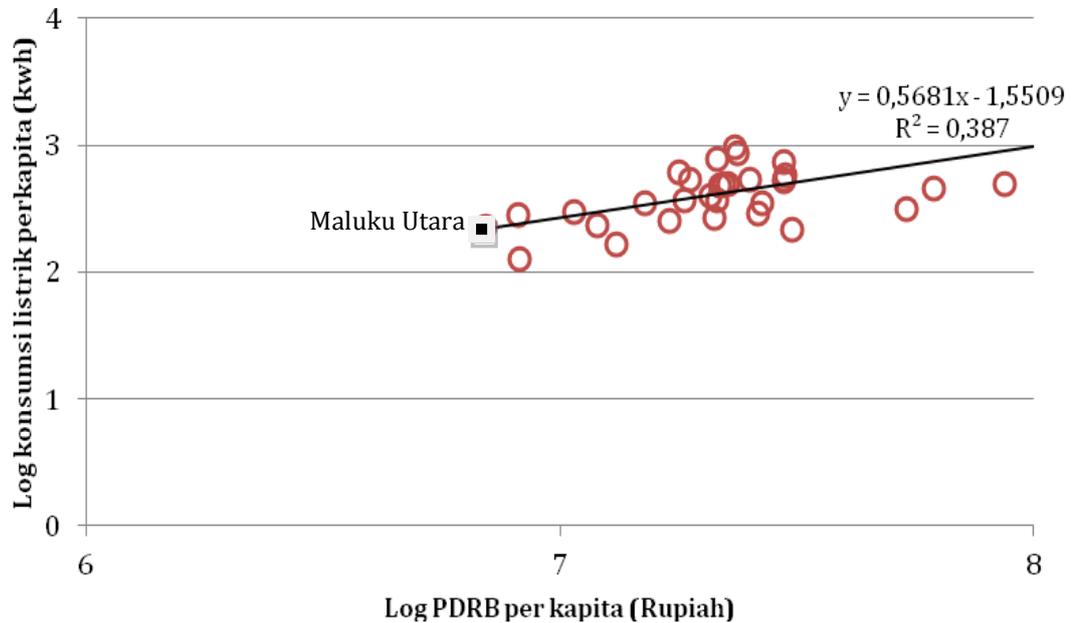
Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di Maluku Utara termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 753,7 kWh (Gambar 11). Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita. Dengan menggunakan data 33 provinsi, terlihat hubungan yang positif antara PDRB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 12). Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik.

Gambar 11
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

Gambar 12
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013



Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

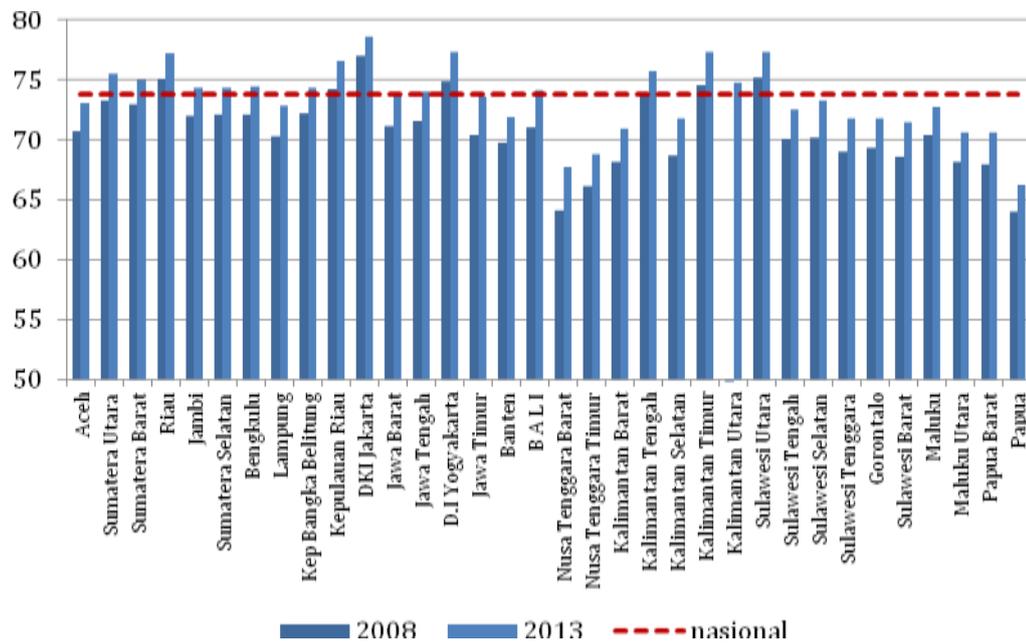
Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu perekonomian, konsumsi listriknya cenderung semakin tinggi pula. Posisi Maluku Utara berada di bawah kurva linier, menunjukkan konsumsi listrik Maluku Utara jauh lebih rendah dari di provinsi yang memiliki pendapatan perkapita sama. Dengan demikian, ketersediaan jaringan listrik merupakan salah satu masalah di Maluku Utara.

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Maluku Utara yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008 namun masih jauh di bawah IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 13).

IPM Maluku Utara menduduki peringkat ke-30 secara nasional pada tahun 2013 dengan nilai IPM sebesar 70,63. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari angka 65,4 tahun pada tahun 2008 menjadi 66,97 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Maluku Utara meningkat dari 8,60 tahun pada 2008 menjadi 8,72 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Maluku Utara pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 95,44 menjadi 97,45 persen, lebih tinggi dari angka nasional sebesar 94,14.

Gambar 13
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

Perbaikan kualitas sumber daya manusia juga tercermin dari komposisi angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA meningkat dari 32,25 persen pada tahun 2008 menjadi 40,99 persen pada tahun 2014. Perbaikan kualitas angkatan kerja ini menjadi modal berharga untuk mendukung industrialisasi berbasis pertanian.

Tabel 8
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014	Perubahan
1	≤ SD	212.911	208.201	(4.710)
2	SMTp	72.911	82.925	10.014
3	SMTA Umum	101.935	129.462	27.527
5	Diploma I/II/III/Akademi	12.770	19.145	6.375
6	Universitas	21.353	53.624	32.271
	Total	421.880	493.357	71.477

Sumber: BPS, 2014

6. Tabungan Masyarakat

Salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat adalah tabungan masyarakat. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan berkembang apabila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi.

Rasio pinjaman terhadap simpanan di Maluku nilainya lebih kecil dari satu, menunjukkan terbatasnya potensi simpanan masyarakat di Maluku Utara, atau terdapat keterbatasan tabungan sebagai sumber modal masyarakat. Sebagai perbandingan, rasio pinjaman terhadap simpanan untuk nasional sebesar 0,92 menunjukkan sumber permodalan masyarakat secara nasional cukup memadai (Tabel 9).

Tabel 9
Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Maluku Utara	4.911	4.988	1,01	0,16
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92	0,47

Sumber: BPS, 2014

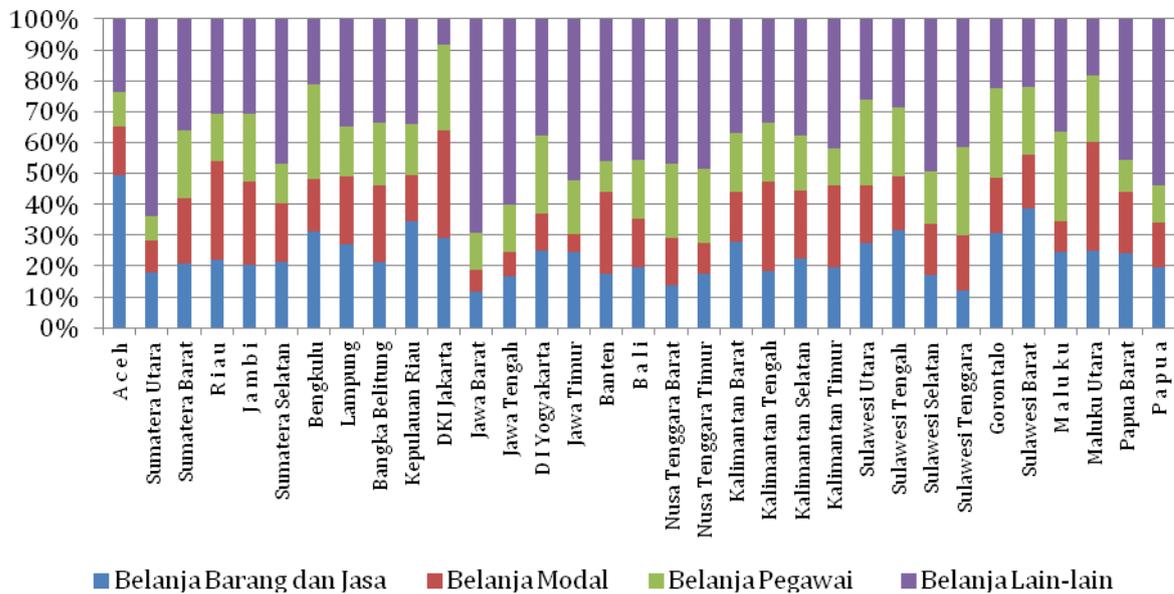
Rasio PMTB terhadap simpanan di Maluku Utara nilainya kurang dari satu, menunjukkan potensi simpanan masyarakat masih memenuhi untuk pembiayaan investasi di daerah. Hal ini mengindikasikan sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Maluku Utara bersifat konsumtif. Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat pada sektor produktif, selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat

7. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

Investasi pemerintah yang umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat *non excludable* dan atau *non rivalry* memiliki peran yang tidak tergantikan dibandingkan dengan peran swasta. Peran pemerintah semakin penting di daerah-daerah relatif tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM). Tanpa itu, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang.

Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan investasi publik dapat ditunjukkan melalui rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Maluku Utara. Rasio belanja modal di Maluku Utara pada tahun 2013 cukup tinggi, yaitu sebesar 35,22 persen dan rasio belanja pegawai sebesar 21,50 (Gambar 14). Apabila anggaran pada belanja publik lebih diorientasikan pada belanja modal akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Gambar 14
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



Sumber: BPS, 2013

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Perekonomian wilayah Maluku Utara relatif tertinggal namun prospek pertumbuhan daerah cukup baik bila dilihat dari beberapa modal pembangunan yang dimiliki, antara lain perkembangan kualitas sumber daya manusia, kesenjangan internal yang rendah, dan prospek integrasi ekonomi daerah ke dalam pengembangan ekonomi Kepulauan Maluku dan Papua. Tingkat kesenjangan konsumsi masyarakat di Provinsi Maluku Utara (indeks gini) selama periode 2008-2013 mengalami sedikit penurunan dari angka 0,33 menjadi 0,32, lebih rendah dari angka nasional yang sebesar 0,35 pada tahun 2008 menjadi 0,4 pada tahun 2013. Kesenjangan output antarkabupaten/kota di Maluku Utara tergolong rendah secara nasional. Tingkat kesenjangan yang rendah akan menciptakan suasana yang kondusif bagi upaya penurunan kemiskinan, peningkatan kerukunan sosial, dan penciptaan stabilitas politik dan keamanan.

Realisasi percepatan pengembangan ekonomi Kepulauan Maluku dan Papua akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Manfaat dari proyek-proyek infrastruktur utama di kota-kota pusat pertumbuhan diperkirakan tak hanya memberi manfaat kota bersangkutan tetapi juga wilayah sekitarnya. Hal ini sangat bergantung pada aksesibilitas wilayah Maluku Utara dan konektivitasnya dengan pusat pertumbuhan terdekat di wilayah Kepulauan Maluku dan Papua.

Berdasarkan modal pembangunan yang dimiliki dan semakin meningkatnya kinerja pembangunan, prospek pembangunan Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Maluku dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 5,9 – 7,8 persen dapat tercapai dengan meningkatkan optimalisasi potensi sumberdaya yang

dimiliki daerah. Pada tahun 2015 prospek pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara akan membaik terutama dipengaruhi oleh faktor musiman yang mendorong investasi seiring penyelesaian proyek infrastruktur di wilayah ini. Pembangunan jalan lingkar di Maluku dan Maluku Utara turut mendukung pertumbuhan investas di wilayah ini.

2. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Maluku Utara harus dilakukan dengan optimal agar sesuai dengan Buku III RPJMN 2015-2019. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 6,6 – 4,6 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara sebesar 7,50 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Maluku Utara harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 2,9 poin persentase atau 0,48 poin persentase per tahun.
3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan Provinsi Maluku Utara akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Maluku Utara maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah, antara lain melalui transmisi perdagangan komoditas ekspor sektor batubara dan kelapa sawit.

E. Penutup

1. Isu Strategis Daerah

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- a. Industrialisasi sektor pertanian
- b. Pengembangan lapangan kerja berkualitas
- c. Perbaikan iklim investasi daerah
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan
- e. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan
- f. Peningkatan alokasi belanja modal pemerintah daerah

2. Rekomendasi Kebijakan

Penanganan isu-isu di atas diperkirakan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu disarankan beberapa kebijakan operasional sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;

- b. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses input produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi;
- c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- d. Perbaikan kualitas jaringan jalan, dan pengembangan system transportasi maritime (laut dan penyebrangan antar pulau)
- e. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah kepulauan dengan memanfaatkan sumber energi alternatif ;
- f. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- h. Pengendalian inflasi daerah dan peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah.